

Katalog: 4601008.33

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Provinsi Jawa Tengah 2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**



INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Provinsi Jawa Tengah 2018

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA PROVINSI JAWA TENGAH 2018

ISBN	:	
No. Publikasi	:	33520.1915
Katalog	:	4601008.33
Ukuran Buku	:	10,5 cm x 14,8 cm
Jumlah Halaman	:	vi + 41 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial

Gambar Kulit :

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh :

© Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

Dicetak oleh :

CV. Java Luhur Makmur Abadi

"This cover has been designed using resources from Freepik.com"

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Tengah 2018 menyajikan analisis deskriptif hasil IDI 2018 untuk membantu pengguna data memahami perkembangan demokrasi di Jawa Tengah.

Materi yang disajikan dalam booklet ini memuat hal-hal yang terkait dengan perkembangan aspek, variable, dan indikator IDI. Publikasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan/kajian dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan pembangunan demokrasi di Jawa Tengah.

Penyajian informasi diuraikan secara sederhana dalam bentuk tabel, gambar serta uraian ringkas agar mudah dipahami. Semoga bermanfaat.

Semarang, Desember 2019
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Jawa Tengah



Sentot Bangun Widoyono M.A.

<https://jateng.bps.go.id>

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
I. Demokrasi	3
II. Apa itu IDI?	5
III. Mengapa IDI Diperlukan?	7
IV. Apa Manfaat IDI?	9
V. Bagaimana Metodologi IDI?	11
VI. Gambaran Umum IDI Indonesia	19
VII. IDI Jawa Tengah 2016	23
VIII. Penutup	37

IDI Jawa Tengah 2018
sebesar

72,17
(sedang)



Dibandingkan tahun 2017,
IDI Jawa Tengah 2018
meningkat **1,32** poin

IDI Jawa Tengah 2018
dipengaruhi oleh

3

aspek
demokrasi



KEBEBASAN SIPIL

76,21

↑ 7,14 poin



HAK-HAK POLITIK

66,92

↓ 0,32 poin



LEMBAGA DEMOKRASI

75,42

↓ 3,40 poin

I. Demokrasi

Demokrasi merupakan sistem politik yang memberikan ruang bagi keadilan dan persamaan bagi semua warga negara. Sistem ini menjadi pilihan paling populer yang digunakan negara-negara di dunia. Sekalipun demikian, pada prakteknya negara-negara yang mengaku demokratis tidak otomatis melakukan pengelolaan negara dan kekuasaan dengan norma-norma demokrasi. Assiddiqie (2005: 242-245) mengidentifikasi tiga persoalan yang muncul dalam kesenjangan antara gagasan dan pelaksanaan demokrasi. *Pertama*, hal yang paling nyata, meskipun 97 persen negara yang ada di zaman modern ini mengklaim menganut sistem demokrasi atau kedaulatan rakyat, tetapi praktek penerapannya di lapangan berbeda antara satu negara dengan yang lain, mulai dari Amerika Serikat sampai ke RRC, Kuba, bahkan eks-Uni Sovyet semua mengklaim menganut demokrasi. Perbedaan ini antara lain karena adanya jarak konseptual antara kaum individualis dengan kaum kolektivis. Kaum liberalis-individualis menganggap rakyat yang berdaulat adalah individu yang otonom sedangkan kaum kolektivis-komunis menganggap rakyat yang berdaulat

dalam pengertian kolektif dan totaliter (*totalitarian*). *Kedua*, demokrasi juga mendapat tantangan dari kaum agamawan yang lebih meyakini kekuasaan tertinggi itu berasal dari Tuhan, dan bukan berasal dari rakyat. *Ketiga*, gagasan demokrasi itu sebagaimana terlihat dalam kenyataan beragamnya cara orang mempraktekan, seringkali dipraktekan secara sepihak oleh para penguasa. Bahkan di sepanjang sejarah, corak penerapannya juga terus berkembang dari waktu ke waktu.

Dengan konsepsi tersebut, tidak ada jaminan jika demokrasi menjadi *deficit* sebagai jargon penguasa. Diperlukan instrumen universal yang dapat mengukur pelaksanaan demokrasi dan perkembangannya di berbagai negara. Beberapa lembaga internasional menawarkan sistem yang memungkinkan untuk melakukan kuantifikasi terhadap demokrasi. *Freedom House* misalnya, sejak tahun 1972 melakukan pengukuran demokrasi dengan klasifikasi *free countries*, *partly free*.

II. Apa itu IDI ?

Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di tingkat daerah maupun pusat bukan sesuatu hal yang mudah. Pembangunan demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Sejak tahun 2009, Indonesia telah mengembangkan pengukuran demokrasi berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Indeks ini disusun oleh BPS dan Kemenkopolhukam, didukung oleh Bappenas, Kemendagri, dan UNDP. Sejak IDI 2016, UNDP sudah tidak terlibat dalam penyusunan IDI.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial-politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode

pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia, yaitu antara lain terkait dengan realitas demokrasi di Indonesia yang tidak bisa dipisahkan dari dinamika pergeseran relasi antara negara dan masyarakat pada periode reformasi. IDI sebagai sebuah alat ukur perkembangan demokrasi yang khas Indonesia, memang dirancang untuk sensitif terhadap naik-turunnya kondisi demokrasi regional. Karena IDI disusun berdasarkan *evidence based* (kejadian) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi.

IDI hanya mengukur perkembangan demokrasi politik di provinsi dan hanya mengindikasikan potret demokrasi di provinsi, IDI juga digunakan untuk mengukur demokrasi dari dua sisi, yaitu sisi negara (pemerintah) dan masyarakat.

III. Mengapa IDI Diperlukan?

Setelah lebih lima belas tahun berjalan sejak Reformasi pada tahun 1998, muncul pertanyaan sejauhmana sesungguhnya perkembangan demokrasi yang telah terjadi, khususnya pada tingkat provinsi? Sebab, selama ini perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, walaupun dapat dirasakan, namun tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor penyumbangannya. Upaya menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empirik yang kuat.

Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah, biasanya, dikaitkan dengan faktor struktural (tingkat perkembangan ekonomi), kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Penjelasan-penjelasan tersebut acap menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif, sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia.

Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain; sulitnya mendapatkan *lesson learned*, dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik Sehingga, langkah-langkah kongkrit untuk pembangunan demokrasi sulit direncanakan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif yang diharapkan memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi (*sharing*) pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian.

IV. Apa Manfaat IDI?

IDI diharapkan memiliki sejumlah manfaat, utamanya adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia yang didasarkan atas data-data dengan tolok ukur yang jelas. Data-data yang diperoleh dari IDI dapat membantu mempelajari perkembangan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia,
2. Bagi perencanaan pembangunan politik di tingkat provinsi, data-data yang ditunjukkan IDI mampu menunjukkan aspek, variabel, atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang, sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan. Seluruh pemangku kepentingan dapat menunjuk data IDI sebagai rujukan dalam proses deliberasi perumusan kebijakan dan program pembangunan politik/ demokrasi berdasarkan bukti-bukti empiris.

3. IDI merupakan indikator yang tidak hanya melihat gambaran demokrasi yang berasal dari sisi kinerja pemerintah/birokrasi saja. Namun, juga melihat perkembangan demokrasi dari aspek peran masyarakat, lembaga legislatif (DPRD), partai politik, lembaga peradilan dan penegak hukum. Oleh karena itu, perkembangan IDI merupakan tanggung jawab bersama semua *stakeholder*, tidak hanya pemerintah saja.

V. Bagaimana Metodologi IDI?

Data IDI dikumpulkan dengan menggunakan dua metode pendekatan, kuantitatif dan kualitatif. Secara keseluruhan terdapat tiga tahapan pengumpulan data IDI, yaitu:

1. Koding surat kabar dan koding dokumen

Semua peristiwa yang terkait indikator IDI yang diberitakan periode Januari – Desember 2018 pada surat kabar yang telah dipilih, yakni surat kabar lokal dengan oplah tertinggi. Provinsi Jawa Tengah menggunakan surat kabar Suara Merdeka. Review dokumen, semua dokumen tertulis yang masih berlaku dan terkait dengan indikator IDI dalam rentang waktu 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018. Dokumen dapat berupa catatan, laporan, *press release*, Perda, surat edaran, maupun surat keputusan.

2. *Focus Group Discussion* (FGD) IDI

FGD berfungsi sebagai untuk melengkapi kekurangan yang berasal dari data kuantitatif . Dalam FGD, hasil *review* surat kabar dan dokumen dijadikan acuan

untuk mengklarifikasi berita/data, dan menggali data yang sangat mungkin luput diberitakan oleh surat kabar.

3. Wawancara Mendalam (WM) IDI

Dilakukan untuk menjangkau fakta/kejadian yang mungkin masih terlewat, atau sudah tertangkap namun kurang lengkap deskripsi dan fakta pendukungnya, karena tidak memungkinkan dieksplorasi secara detail dalam forum FGD. Nara sumber WM adalah orang-orang terpilih yang memang banyak mengetahui fakta tertentu yang terkait indikator IDI.

Seluruh tahapan kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan merujuk pada indikator-indikator yang disusun dari turunan tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*). Dari tiga aspek tersebut kemudian diturunkan menjadi 11 variabel yang kemudian dijabarkan lagi melalui 28 indikator teknis.

Komponen Penghitungan IDI 2009 - 2018

Aspek	Variabel	Indikator
1. Kebebasan Sipil	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	1. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
		2. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat
	2.Kebebasan Berpendapat	3. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat
		4. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat
	3.Kebebasan Berkeyakinan	5. Aturan tertulis yang membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		6.Tindakan/pernyataan pejabat membatasi kebebasan menjalankan ibadah agama
		7. Ancaman/penggunaan kekerasan dari satu kelompok terkait ajaran agama
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	8. Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis, kelompok
		9. Tindakan/pernyataan pejabat yang diskriminatif dalam hal gender dst
		10. Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2018 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
2. Hak-Hak Politik	5. Hak Memilih dan Dipilih	11. Hak memilih atau dipilih terhambat
		12. Kurang fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
		13. Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)
		14. <i>Voters turnout</i>
		15. Persentase Perempuan Terpilih Terhadap Total Anggota DPRD Provinsi
	6. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan	16. Demonstrasi/mogok yang Bersifat Kekerasan
		17. Pengaduan Masyarakat Mengenai Penyelenggaraan Pemerintahan
3. Lembaga Demokrasi	7. Pemilu yang Bebas dan Adil	18. Keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu
		19. Kecurangan dalam penghitungan suara
	8. Peran DPRD	20. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Kesehatan
		21. Perda yang merupakan inisiatif DPRD
		22. Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif

Komponen Penghitungan IDI 2009 – 2018 (lanjutan)

Aspek	Variabel	Indikator
3. Lembaga Demokrasi	9. Peran Partai Politik	23. Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Partai Politik Peserta Pemilu
		24. Persentase Perempuan dalam Kepengurusan Partai Politik
	10. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	25. Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
		Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif
		26. Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah
		Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif
	11. Peran Peradilan yang Independen	27. Keputusan Hakim yang Kontroversial
		28. Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh Jaksa atau Polisi

Penyusunan IDI dilakukan dengan cara skoring yang terdiri dari dua level yaitu level 1 merupakan skoring data kuantitatif sesuai temuan koding surat kabar dan koding dokumen dan level 2 merupakan skoring data kualitatif melalui *expert judgement*.

Skoring data kuantitatif (hasil koding surat kabar dan dokumen) bersifat *complementary data* yang artinya data tertinggi/terbesar hasil pengukuran pada koding Koran atau koding dokumen diambil sebagai perhitungan skor. Sedangkan skoring data kualitatif (hasil FGD dan *in-depth interview*), pembobotan per kasus ditetapkan sebesar 75 persen dibanding kasus yang berasal dari surat kabar. Untuk informasi tentang aturan tertulis tetap dihitung 100 persen.

Tahapan selanjutnya, masing-masing aspek, variable dan indikator IDI dibobot oleh juri ahli (*expert judge*) yang terdiri dari unsur perempuan, akademisi, praktisi/politisi, pejabat pemerintahan, NGO/LSM dan purnawirawan TNI/Polri, dengan menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*.

Dari sisi penghitungan Indeks, IDI melalui tiga tahapan proses yakni *pertama*, menghitung indeks akhir untuk setiap indikator; *kedua*, menghitung indeks provinsi; dan *ketiga*, menghitung indeks keseluruhan atau IDI Nasional. Ketiga tahapan ini secara hierarkhis terkait satu dengan yang lain. Skor masing-masing indikator IDI (28 indikator) di setiap provinsi memberikan kontribusi dalam penghitungan indeks 11 variabel IDI, selanjutnya indeks 11 variabel memberikan kontribusi terhadap penghitungan indeks tiga aspek IDI. Komposit indeks ketiga aspek IDI inilah yang merefleksikan indeks demokrasi di masing-masing provinsi. Dan pada akhirnya komposit indeks provinsi menentukan IDI Nasional.

Untuk menggambarkan capaian tingkat demokrasi dalam IDI digunakan skala 0 – 100. Skala ini merupakan skala normatif di mana 0 adalah tingkat terendah dan 100 adalah tingkat tertinggi. Tingkat terendah (nilai indeks = 0) secara teoritik dapat terjadi bila semua indikator mendapatkan skor yang paling rendah (skor 0). Sebaliknya, tingkat tertinggi (nilai indeks = 100) secara teoritik dimungkinkan apabila seluruh indikator memperoleh skor tertinggi. Selanjutnya, untuk memberi makna

lebih lanjut dari variasi indeks yang dihasilkan, skala 0 – 100 tersebut dibagi ke dalam tiga kategori tingkat demokrasi, yakni “baik” (indeks > 80), “sedang” (indeks 60 – 80), dan “buruk” (indeks < 60).

Sejak tahun 2015 sejalan dengan dinamika demokrasi dan agar sensitif dengan kondisi lapangan terkini maka diterapkan dua indikator baru yakni indikator 25 “Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN” **sebelumnya** “Laporan dan berita penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan calon/parpol tertentu dalam pemilu legislatif” dan indikator 26 yakni “Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah” **sebelumnya** “Laporan dan berita keterlibatan PNS dalam kegiatan politik parpol pada pemilu legislatif”.

VI. Gambaran Umum IDI Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) level nasional tahun 2018 mencapai **72,39** dalam skala indeks 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan IDI 2017 yang capaiannya sebesar 72,11. Meskipun sedikit mengalami perbaikan, tingkat demokrasi Indonesia tersebut masih dalam kategori “sedang”.

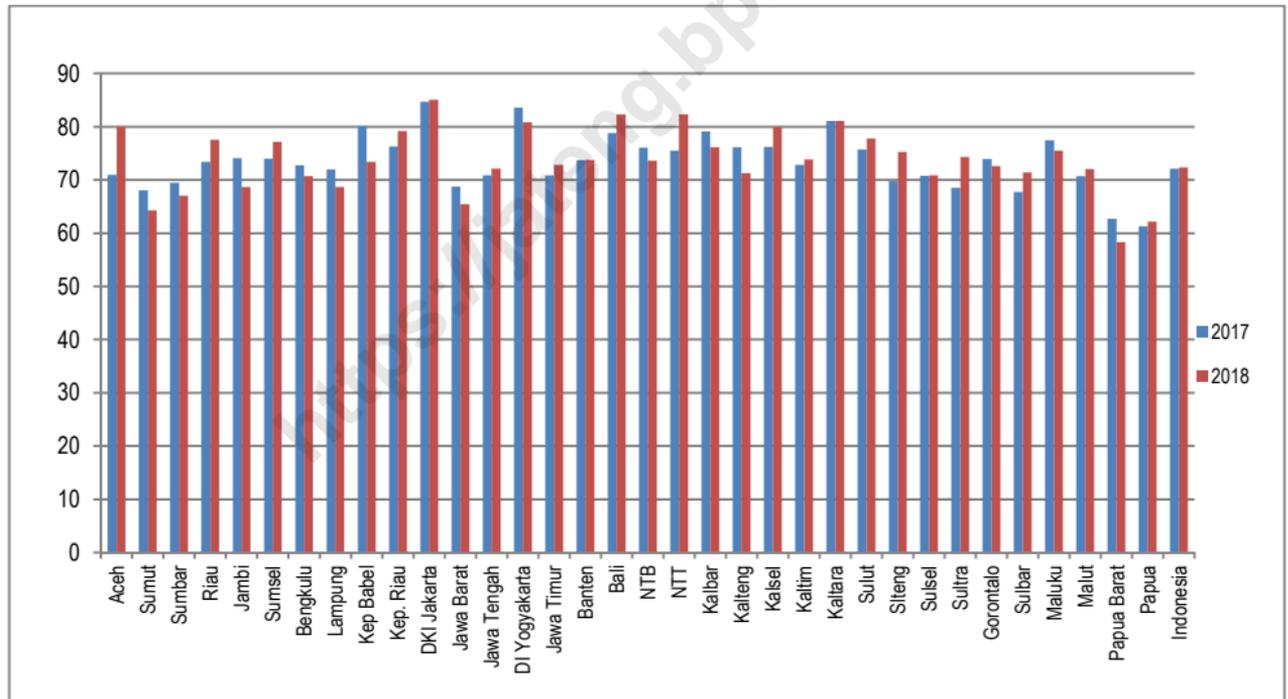
Angka IDI 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil dengan rata-rata nasional 78,46; aspek Hak-hak Politik sebesar 65,79; dan aspek Lembaga Demokrasi sebesar 75,25.

Pada periode 2017–2018, jumlah provinsi yang memiliki angka IDI berkategori “baik”, bertambah dari empat provinsi menjadi lima provinsi. Namun demikian, terdapat satu provinsi yang masuk ke kategori “buruk”, yaitu Provinsi Papua Barat, sementara 28 provinsi lainnya berada pada kategori “sedang”. Provinsi DKI Jakarta berhasil mempertahankan posisi pada peringkat pertama dengan nilai

IDI sebesar 85,08; diikuti oleh Provinsi Bali dengan nilai IDI sebesar 82,37. Posisi ketiga dan keempat adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kalimantan Utara dengan nilai IDI masing-masing sebesar 82,32 dan 81,07. Posisi kelima ditempati oleh Provinsi Yogyakarta dengan capaian IDI sebesar 80,82, setelah tahun sebelumnya Provinsi DI Yogyakarta berada pada posisi kedua.

Dibandingkan dengan capaian IDI pada tahun 2017, terdapat 20 provinsi mengalami peningkatan, sementara 14 provinsi mengalami penurunan angka IDI di tahun 2018 ini. Provinsi Aceh dan Nusa Tenggara Timur tercatat sebagai dua provinsi dengan peningkatan IDI terbesar, masing-masing meningkat sebesar 9,04 poin dan 6,82 poin. Sementara itu, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi, menunjukkan penurunan IDI terbesar, masing-masing menurun sebesar 6,68 poin dan 5,41 poin.

Grafik 1. Perkembangan IDI berdasarkan Provinsi, 2017-2018



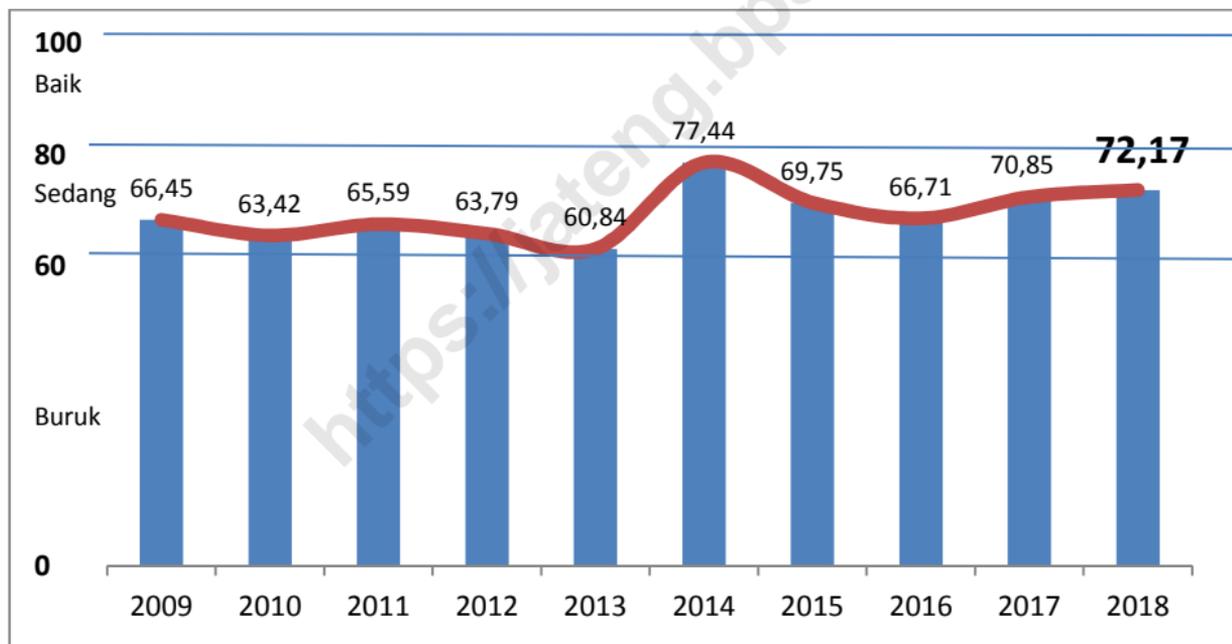
<https://jateng.bps.go.id>

VII. IDI Jawa Tengah 2018

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Tengah pada 2018 mencapai **72,17** dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI Jawa Tengah 2017 yang capaiannya sebesar **70,85**. Meskipun mengalami peningkatan, tingkat demokrasi di Jawa Tengah secara umum masih dalam kategori “sedang”.

Capaian IDI Jawa Tengah dari tahun 2009 hingga 2018 mengalami fluktuasi. Pada awal mulai dihitung (2009), capaian IDI hanya sebesar 66,45. Angka ini terus berfluktuasi hingga mencapai momen tertingginya pada tahun 2014 sebesar 77,44; walaupun pada akhirnya kembali turun menjadi 70,85 pada tahun 2017 dan 72,17 pada tahun 2018.

Grafik 2. Perkembangan IDI Provinsi Jawa Tengah, 2009-2018



1. Indeks Aspek IDI

Angka IDI 2018 merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni aspek Kebebasan Sipil yang bernilai 76,21; aspek Hak-hak Politik yang bernilai 66,92; dan aspek Lembaga Demokrasi yang bernilai 75,42.

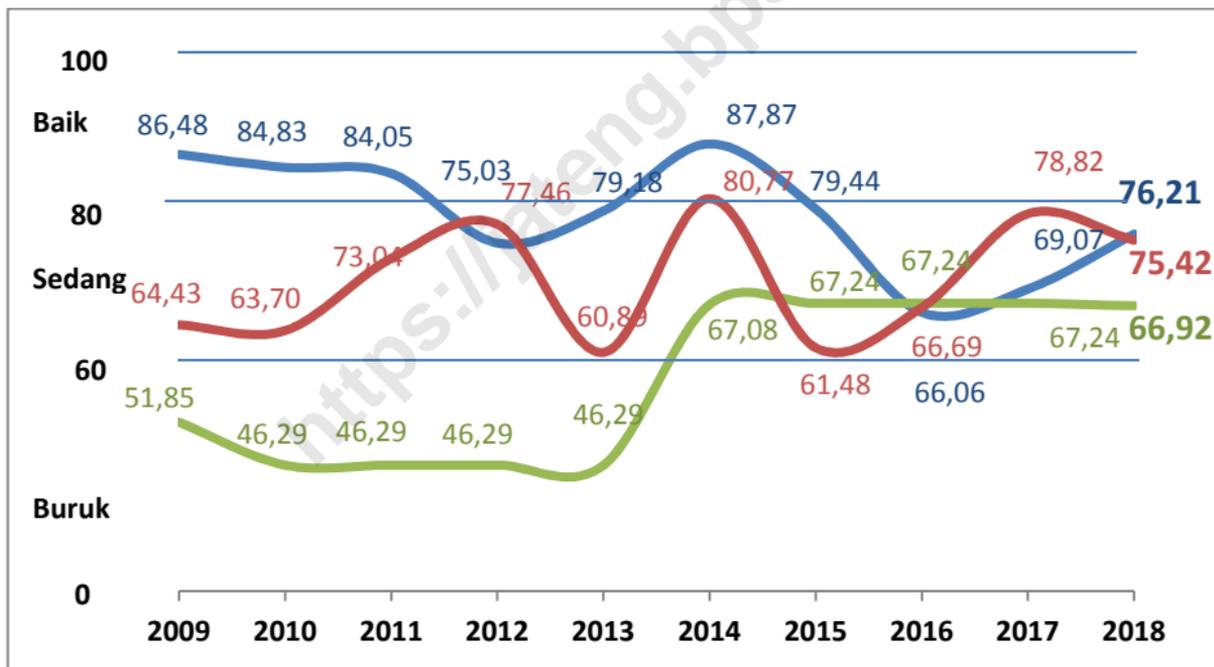
Dalam tiga aspek demokrasi yang diukur pada tahun 2018, indeks aspek Kebebasan Sipil meningkat 7,14 poin dibandingkan tahun 2017. Sementara itu, nilai aspek Lembaga Demokrasi mengalami penurunan sebesar 3,40 poin dibandingkan tahun 2017. Demikian halnya dengan nilai indeks hak-hak politik yang turun sebesar 0,32 poin.

Serupa dengan tahun 2017, pada tahun 2018 tidak ada lagi indeks aspek yang berkategori “buruk”. Indeks aspek Kebebasan Sipil pada awal pengukuran 2009 sudah mencapai kategori “baik”. Namun, pada 2012 hingga 2018 aspek ini menjadi kategori “sedang”, kecuali pada tahun 2014 yang kembali berkategori baik.

Sementara pada aspek Hak-hak Politik sejak 2009 hingga 2013, stabil pada kategori “buruk”. Perubahan signifikan terjadi pada 2014, aspek ini menembus kategori “sedang”. Pada IDI 2018 aspek Hak-hak Politik tetap pada kategori “sedang”.

Aspek Lembaga Demokrasi merupakan aspek yang secara kategori stabil. Sejak pengukuran pada 2009 hingga 2018 aspek Lembaga Demokrasi tetap pada kategori “sedang”, bahkan pada tahun 2014 sempat berkategori “baik”.

Grafik 3. Perkembangan Indeks Aspek IDI Provinsi Jawa Tengah, 2011-2018



2. Indeks Variabel IDI

Menurut nilai indeks variabel IDI 2018 terdapat tiga variabel yang mengalami penurunan indeks, empat variabel mengalami peningkatan dan empat variabel yang tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun 2017. Dari tiga variabel yang mengalami penurunan, variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah menurun cukup tajam, yakni sebesar 28,86 point, dari nilai 83,16 pada 2017 menjadi 54,30 pada 2018, yang mengakibatkan capaiannya mengalami pergeseran dari kategori “baik” di tahun 2017 menjadi kategori “buruk” pada 2018.

Selain variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, variabel Kebebasan Berkeyakinan juga mengalami penurunan yang cukup berarti, mencapai 6,16 poin. Penurunan nilai indeks variabel ini menyebabkan capaian indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan bergeser dari kategori “baik” pada tahun 2017 menjadi kategori “sedang” di tahun 2018, yaitu 81,54 pada 2017 menjadi 75,38 pada 2018.

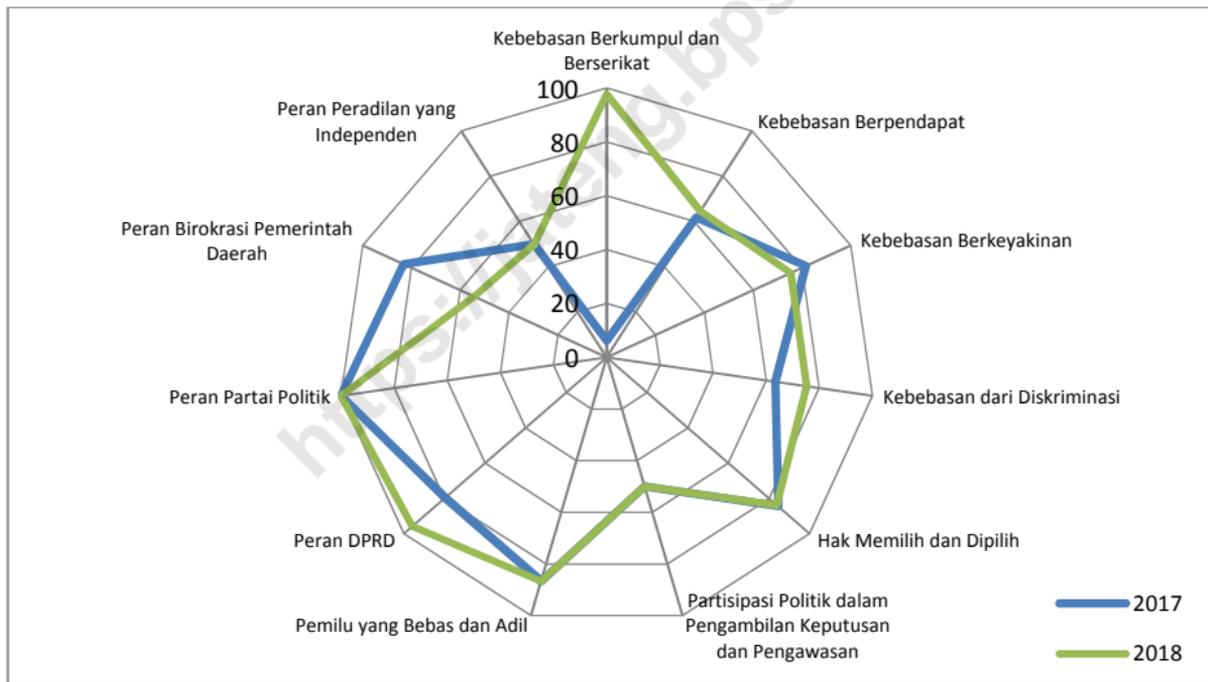
Variabel lain yang juga mengalami penurunan adalah variabel Hak Memilih dan Dipilih meskipun nilai indeksnya turun 0,64 poin, dari 84,48 (2017) menjadi 83,84 (2018) namun demikian masih dalam kategori “baik”.

Di sisi lain, variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat meningkat secara bermakna sebesar 91,41 poin, dari 6,25 pada 2017 menjadi 97,66 di 2018. Peningkatan nilai indeks ini mengubah posisi variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, yang pada tahun 2017 berada di kategori “buruk” maka pada tahun 2018 masuk dalam kategori “baik”. Demikian pula dengan variabel Peran DPRD yang mengalami peningkatan nilai indeks sebesar 16,02 poin, yaitu dari 79,74 (2017) menjadi 95,77 (2018), yang juga mengubah posisi variabel Peran DPRD dari kategori “sedang” (2017) menjadi kategori “baik” (2018).

Variabel lain yang juga mengalami peningkatan nilai indeks adalah variabel Kebebasan dari Diskriminasi, yang meningkat sebesar 11,73 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya (63,53 pada 2017 menjadi 75,25 di 2018) meskipun masih dalam kategori yang sama, yaitu kategori sedang. Demikian pula

untuk variabel Kebebasan Berpendapat yang juga mengalami peningkatan nilai indeks meskipun tidak mengalami pergeseran capaian. Jika di tahun 2017 variabel Kebebasan Berpendapat bernilai 61,82 maka pada tahun 2018 variabel ini meningkat 2,74 poin, menjadi 64,56 dengan capaian kinerja berada pada kategori “sedang”.

Grafik 4. Perkembangan Indeks Variabel IDI Provinsi Jawa Tengah, 2017-2018



3. Skor Indikator IDI

Indikator pada IDI 2018 terdapat 15 indikator mencapai kinerja kategori “baik” (skor di atas 80) yaitu:

- a. Indikator 1, Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- b. Indikator 2, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat,
- c. Indikator 8, Aturan Tertulis yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- d. Indikator 9, Tindakan/Pernyataan Pejabat yang Diskriminatif dalam Hal Gender, Etnis, dan Kelompok,
- e. Indikator 11, Hak Memilih atau Dipilih Terhambat,
- f. Indikator 13, Kualitas daftar pemilih tetap (DPT),

- g. Indikator 17, Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan,
- h. Indikator 18, Keberpihakan KPUD dalam Penyelenggaraan Pemilu
- i. Indikator 20, Presentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD,
- j. Indikator 21, Presentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan,
- k. Indikator 22 Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif,
- l. Indikator 23, Kegiatan Kaderisasi yang Dilakukan Parpol Peserta Pemilu,
- m. Indikator 24, Persentase Perempuan Pengurus Partai Politik,
- n. Indikator 26, Upaya Penyediaan Informasi APBD oleh Pemerintah Daerah,
- o. Indikator 27, Keputusan Hakim yang Kontroversial.

Namun demikian, pada tahun 2018 masih ditemukan masalah kronis yakni kinerja demokrasi “buruk” (skor di bawah 60). Indikator-indikator yang termasuk dalam kategori tersebut adalah:

- a. Indikator 4, Ancaman/Penggunaan Kekerasan oleh Masyarakat yang Menghambat Kebebasan Berpendapat,
- b. Indikator 6, Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya,
- c. Indikator 10, Ancaman/penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis, kelompok ,
- d. Indikator 16, Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan,
- e. Indikator 25, Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN
- f. Indikator 28, Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi.

Indikator-indikator tersebut memerlukan perhatian khusus dari semua pihak agar nilainya dapat membaik.

Tabel 1. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Kebebasan Sipil, 2012 - 2018

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Kebebasan Sipil		75,03	79,18	87,87	79,44	66,06	69,07	76,21
I	Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	81,88	35,00	91,25	92,97	12,50	6,25	97,66
1	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	90,00	40,00	90,00	100,00	0,00	0,00	100,00
2	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	25,00	0,00	100,00	43,75	100,00	50,00	81,25
II	Kebebasan Berpendapat	47,20	61,09	76,12	72,89	75,70	61,82	64,56
3	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	56,67	73,33	73,33	87,50	70,83	54,17	75,00
4	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat	0,00	0,00	90,00	0,00	100,00	100,00	12,50
III	Kebebasan Berkeyakinan	75,32	81,31	87,06	71,58	66,51	81,54	75,38
5	Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat dalam menjalankan agamanya	100,00	91,30	91,30	83,70	86,96	86,96	78,26
6	Tindakan atau pernyataan pejabat Pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat untuk menjalankan ajaran agamanya	40,00	100,00	87,50	68,75	43,75	50,00	50,00
7	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	0,00	30,00	70,00	25,00	0,00	80,00	80,00

Tabel 1. (Lanjutan)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Kebebasan Sipil		75,03	79,18	87,87	79,44	66,06	69,07	76,21
IV	Kebebasan dari Diskriminasi	82,75	96,53	93,23	96,43	80,03	63,53	75,25
8	Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	77,50	87,50	87,50	87,50	87,50	87,50	100,00
10	Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	66,67	100,00	90,00	100,00	50,00	0,00	25,00

Tabel 2. Skor Indikator IDI Menurut Hak-Hak Politik, 2012 - 2018

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Hak-Hak Politik		46,29	46,29	67,08	67,24	67,24	67,24	66,92
V	Hak Memilih dan Dipilih	42,59	42,59	84,16	84,48	84,48	84,48	83,84
11	Hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	34,62	34,62	92,95	92,95	92,95	92,95	92,95
12	Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok dengan keterbatasan akses tidak dapat menggunakan hak memilih	50,00	50,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
13	Kualitas Daftar Pemilih Tetap (DPT)	30,00	30,00	89,65	89,65	89,65	89,65	89,65
14	<i>Voters turnout</i>	71,26	71,26	73,24	73,24	73,24	73,24	73,24
15	Perempuan terpilih di DPRD provinsi	70,00	70,00	76,67	80,00	80,00	80,00	73,33
VI	Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00						
16	Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. Skor Indikator IDI Menurut Aspek Lembaga Demokrasi, 2012 - 2018

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Lembaga Demokrasi		77,46	60,89	80,77	61,48	66,69	78,82	75,42
VII	Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	94,94	86,71	86,71	86,71	86,71	86,71
18	Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19	Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara	89,87	89,87	73,42	73,42	73,42	73,42	73,42
VIII	Peran DPRD	41,01	43,32	43,22	46,75	50,50	79,74	95,77
20	Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan	52,10	54,97	54,81	63,17	56,72	88,18	94,58
21	Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD	38,46	41,18	41,18	28,57	80,00	66,67	100,00
22	Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif	3,57	3,57	3,57	3,57	3,57	60,71	96,43
IX	Peran Partai Politik	100,00	100,00	99,96	48,49	74,29	100,00	100,00
23	Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00	100,00	100,00	42,86	71,43	100,00	100,00
24	% perempuan dalam kepengurusan partai politik	100,00	100,00	99,64	99,19	100,00	100,00	100,00

Tabel 3. (Lanjutan)

No	Indikator	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aspek Lembaga Demokrasi		77,46	60,89	80,77	61,48	66,69	78,82	75,42
X	Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	80,30	98,48	30,13	27,43	83,16	54,30
25	Kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	-	-	-	26,32	10,53	63,16	0,00
	Laporan penggunaan fasilitas pemerintah untuk kepentingan parpol dalam pemilu legislatif	90,90	90,90	100,00	-	-	-	-
26	Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	-	-	-	33,33	41,66	100,00	100,00
	Laporan keterlibatan PNS dalam kegiatan parpol peserta pemilu legislatif	69,70	69,70	96,97	-	-	-	-
XI	Peran Peradilan Yang Independen	75,00	0,00	75,00	100,00	100,00	50,00	50,00
27	Keputusan hakim yang kontroversial	50,00	0,00	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00

<https://jateng.bps.go.id>

VIII. Penutup

Data IDI sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan politik dan demokrasi sekaligus sebagai acuan bagi pemerintah baik dalam melakukan evaluasi terhadap pembangunan bidang politik maupun dalam mengambil kebijakan sangat bergantung kepada *stakeholder* yang terkait, mulai dari Pokja IDI dalam menyosialisasikan data IDI, pemerintah/instansi hingga partai politik yang terlibat dalam pengumpulan data IDI. Oleh karena itu dalam rangka mendukung program pemerintah untuk memajukan serta untuk meningkatkan perkembangan demokrasi dan pembangunan di bidang politik, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah, sangat diharapkan peran aktif pihak-pihak yang terlibat.



Sensus
Penduduk
2020

#MencatatIndonesia

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Pahlawan No. 6 Semarang 50241

Telp. 024 - 8412802, 8412804, 8412805 Fax. 024 - 8311195

Homepage: <http://jateng.bps.go.id> E-mail : jateng@bps.go.id

ISBN 978-602-5419-72-0



9 786025 419720